

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH NUSA TENGGARA
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran industri unggulan rumput laut, peternakan, perikanan dan pariwisata sebagai penggerak perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat • Belum optimalnya industri unggulan jagung, kakao, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nusa Tenggara Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas budidaya rumput laut, peternakan, dan usaha perikanan tangkap 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru. • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi budidaya rumput laut dan peternakan • Pengembangan insentif bagi konsolidasi usaha perikanan dan peternakan skala mikro dan kecil • Peningkatan dukungan sarana dan prasarana perikanan • Peningkatan akses permodalan khususnya bagi nelayan skala mikro dan kecil
		<ul style="list-style-type: none"> • Nusa Tenggara Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas budidaya jagung, kakao, peternakan, dan usaha perikanan tangkap 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi budidaya rumput laut dan peternakan • Pengembangan insentif bagi konsolidasi usaha perikanan dan peternakan skala mikro dan kecil • Peningkatan dukungan sarana dan prasarana perikanan • Peningkatan akses permodalan khususnya bagi nelayan skala mikro dan kecil
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster industri berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan PKN Mataram dan Kupang 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
	komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • NTB 	sebagai pusat pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterkaitan antara 	<p>bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses permodalan • Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan • Pengembangan kerjasama antara dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian dalam penelitian teknologi tepat guna • Peningkatan promosi produk unggulan dan akses pemasaran <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani

III.M.6-5

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pengembangan industri (PKN)	daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penghubung PKN dan sentra-sentra produksi • Peningkatan prasarana telekomunikasi • Pengembangan pasar lokal dan regional • Pengembangan kerjasama antardaerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pariwisata alam bahari dan budaya 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi (Bd) • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan interkoneksi Mataram dan kota-kota besar nasional lainnya • Peningkatan promosi pariwisata • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan interkoneksi obyek-obyek wisata lokal NTB dan memperkuat keterkaitan poros Mataram-Denpasar
		<ul style="list-style-type: none"> • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pariwisata alam komodo di Pulau Komodo dan Rinca 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi (Bd) • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan interkoneksi Kupang dan kota-kota besar nasional lainnya • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan interkoneksi obyek-obyek wisata lokal NTT dan memperkuat keterkaitan poros wisata Kupang-Mataram-Denpasar • Peningkatan promosi pariwisata • Pengembangan jaringan transportasi darat dan laut untuk mendukung interkoneksi domestik antar obyek wisata
Pembangunan wilayah perbatasan dan kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Belum disepakatinya beberapa segmen batas darat antara RI-Timor Leste • Belum disepakatinya batas maritim RI-Timor Leste karena menunggu penyelesaian batas darat • Rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan penegasan batas negara • Penyediaan sarana dan prasarana lintas batas, pertahanan, dan keamanan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Listrik Desa (EBT) • PLTS Tersebar • PLTS Terpusat • PLTMH (kW) • PLT Angin (kW) • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				pasca-konflik <ul style="list-style-type: none"> • Pengentasan daerah tertinggal Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat dan introduksi teknologi tepat guna • Peningkatan akses permodalan • Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan ekonomi lokal
Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-pulau di Wilayah Nusa Tenggara: <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya akses infrastruktur perhubungan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, khususnya yang melayani daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan interkonektivitas domestik kota-kota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara • Mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antar pulau (pelabuhan) 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>(Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelabuhan Lembar, Sape, Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, Maropko, Bima <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal
<p>Kualitas sumberdaya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya IPM dibanding rata-rata nasional 	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Mengengah dan SMA • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur • Rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 	<p>angkatan kerja berkeampilan dan berpendidikan tinggi</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i> • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar • Sertifikasi ISO 9001:2008 • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014 • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi • Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan vokasional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Pemberian imunisasi dasar kepada balita • Penyediaan akses sumber air bersih • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan prevalensi Tuberculosis • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API) • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau terdepan • Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD) • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru. • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Listrik Desa (EBT) • PLTS Tersebar • PLTS Terpusat • PLTMH (kW) • PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses permodalan • Introduksi teknologi tepat guna • Pengembangan balai latihan kerja • Peningkatan kompetensi pekerja migran (TKI) dan penguatan kelembagaan perlindungan TKI • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan • Peningkatan pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan ekonomi lokal • Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal
<p>Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam tata pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan standar pelayanan minimum

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa <ul style="list-style-type: none"> Tingginya peluang konflik antar golongan dan suku bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> NTB NTT 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan kerjasama antara aparat kepolisian, tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budaya harmonis Pencegahan kejahatan dan tindak pelanggaran hukum Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen Pemberdayaan masyarakat dalam <i>community policing</i> Penghormatan hukum dan nilai adat Penguatan kerjasama pemerintah dan lembaga-lembaga adat dan informal
			<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Penyelenggaraan Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut <ul style="list-style-type: none"> Tingginya perambahan hutan dan gangguan lingkungan 	Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> NTB NTT 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pertanahan Provinsi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah • Integrasi penataan ruang darat dan laut • Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penataan ruang (pertanian, kehutanan, infrastruktur, pertanahan, perikanan dan kelautan) • Penjaringan aspirasi dan penguatan partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah • Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi/lembaga penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya • Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan • Penerapan analisis dampak lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Konservasi keanekaragaman hayati • Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sekitar dan lembaga adat dalam mengelola dan menjaga lingkungan • Peningkatan jumlah polisi hutan dan polisi air di kawasan konservasi • Perencanaan, Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat